

SKRIPSI

**BUDAYA DAN PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT DESA TANJUNG
KERANJANG DALAM PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)**

TAHUN 2021

*(Studi di Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota,
Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara)*



DISUSUN OLEH:

HERLY NOVITA

17520309

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2021



**BUDAYA DAN PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT DESA TANJUNG
KERANJANG DALAM PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)**

TAHUN 2021

*(Studi di Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota,
Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara)*

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR KESARJANAAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

DISUSUN OLEH:

HERLY NOVITA

17520309



JENJANG PENDIDIKAN SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”


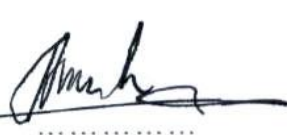

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Desember 2021
Jam : 10:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

NAMA	TANDA TANGAN
<u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
<u>Drs. Sumariono, M.Si</u> Penguji Samping I	
<u>Dra. Herawati, MPA</u> Penguji Samping II	



Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herly Novita

NIM : 17520209

Program Studi : S1 Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Budaya dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Tanjung
Keranjang Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT)
Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar saya kerjakan sendiri, skripsi ini bukan merupakan plagiat ataupun pencurian hasil karya milik orang lain. Bila kemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dan pernyataan ini, saya bersedia diproses untuk melakukan verifikasi dan diberikan sanksi.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakkan integritas akademik di institusi ini.

Yogyakarta, 02 Desember 2021

Penulis



Herly Novita

MOTTO

1. Semua akan indah pada waktu-Nya;
2. “Pray, Believe, dan be Grateful” yang artinya Berdoa, Percaya dan Bersyukur;
3. “Hanya karena proses anda lebih lama dari yang lain, bukan berarti anda gagal” -Harland Sanders-.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan bimbingan-Nya saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan skripsi saya persembahkan untuk semua orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Jesly Lagan dan Mama Berta Liling, karya sederhana ini tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Bapak dan Mama berikan untukku, terimakasih untuk setiap kerja keras, kasih sayang, semangat, motivasi, harapan baik dan doa yang selalu kalian berikan untukku. Tidak ada yang dapat aku berikan selain mempersembahkan karya sederhana dan gelar sarjana (S-1) ini untuk kalian, aku berharap dan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus agar Bapak dan Mama selalu diberikan kesehatan serta perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati;
2. Untuk adikku Jesita Aprilia dan Rio Paskah I, karya sederhana ini kuperssembahkan untuk kalian yang selalu memberikan dukungan, semangat, harapan baik dan doa sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar sarjana (S-I), tidak ada yang bisa ku berikan atas apa yang telah kalian berikan padaku. Sekiranya skripsi ini dapat menjadi motivasi untuk kalian agar selalu bersemangat dalam menempuh pendidikan, Tuhan Yesus memberkati;
3. Untuk Keluarga Besar Kaiku Liling Kasing dan Kakekku Lagan Lalung, Eta Meiranni dan Ruth Raezaline serta untuk teman-temanku; Kak

Junaidy, Grup PMTKJ, Grup Kami Cantik, Grup Lenjeh Comeback dan Sepda GEMURUH, terimakasih karena selalu memberikan semangat dan berdoa untukku, Tuhan Yesus memberkati;

4. Untuk Almamaterku Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dan teman-teman angkatan 2017, terimakasih karena selalu memberikan semangat untukku, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati;
5. Untuk dosen pembimbingku Dr. Rijel Samaloisa, terima kasih karena telah bersabar membimbing dan mengajarkanku dengan segala kebaikan hati bapak, tanpa bapak tidak mungkin skripsi ini bisa diselesaikan, hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa membalas kebaikan dan kemurahan hati bapak, Tuhan Yesus memberkati.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Budaya dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Tanjung Keranjang Dalam Pemilihan Ketua RT Tahun 2021 di Desa Tanjung Keranjang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di kemudian hari. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M. Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dalam penyusunan skripsi;
4. Bapak Drs. Sumarjono. M.Si selaku Dosen Penguji Samping I yang telah menguji, memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam ujian skripsi;
5. Ibu Dra. Herawati, MPA selaku Dosen Penguji Samping II yang telah menguji, memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam ujian skripsi;

6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan civitas akademika STPMMD “APMD” Yogyakarta;
7. Kepala Desa dan seluruh aparat pemerintah Desa Tanjung Keranjang yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian;
8. Seluruh masyarakat Desa Tanjung Keranjang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian;
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 02 Desember 2021

Penulis

Herly Novita

INTISARI

Penelitian ini berjudul “Budaya dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Tanjung Keranjang Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) Tahun 2021: Studi di Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa budaya politik masyarakat dan perilaku memilih masyarakat Desa Tanjung Keranjang, dalam pemilihan Ketua RT.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini adalah budaya dan perilaku memilih masyarakat Desa Tanjung Keranjang dalam pemilihan Ketua RT tahun 2021, subjeknya terdiri dari kepala desa, tokoh adat, calon ketua RT terpilih dan tidak terpilih serta perwakilan masyarakat dari setiap RT sebanyak 5 orang, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pemilihan Ketua RT di Desa Tanjung Keranjang masih didominasi oleh budaya politik bercorak parokhial. Dalam budaya politik parokhial tersebut, partisipasi politik masyarakat rendah, yang disebabkan faktor kognitif, pemilih cenderung tidak kritis dan evaluatif. *Kedua*, pemilih lebih menekankan hubungan emosional, karena adanya kesamaan kultur dan budaya, hubungan kekerabatan serta ketokohan yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku memilih dalam menentukan pilihan politik masyarakat seperti halnya dalam pemilihan Ketua RT di empat RT yakni: RT 001, 002, 003, dan 004. Selain itu, Ketua RT yang terpilih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat kuat dengan keluarga dan masyarakat dilingkungan RT-nya, termasuk dengan tokoh dan tetua adatnya, sehingga pada pemilihan tersebut yang bersangkutan memperoleh dukungan suara maksimal dari pemilih untuk menjadi ketua RT. *Ketiga*, pemilihan Ketua RT di Desa Tanjung Keranjang, memperlihatkan bagaimana budaya dan hubungan kekerabatan serta relasi sosial yang kuat, berpengaruh pada perilaku memilih masyarakat untuk memberikan dukungan suara mayoritas kepada calon ketua RT. Dukungan suara yang signifikan tersebut menjadi penentu keterpilihan seorang calon untuk menjadi ketua RT di wilayahnya.

Kata kunci: Budaya dan Perilaku Memilih, Pemilihan Ketua RT.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki karakteristik dan kondisi yang beragam serta majemuk baik suku, budaya serta adat istiadatnya. Menurut Pusat Badan Statistik (BPS) tahun 2020, Indonesia memiliki 1.340 suku dan memiliki sekitar 718 bahasa daerah. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Dayak.

Masyarakat Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara merupakan masyarakat yang mayoritas suku Dayak. Selain suku Dayak, Desa Tanjung Keranjang juga dihuni oleh masyarakat yang berasal dari suku-suku lain seperti suku Jawa, Bugis, dan Timur. Masyarakat Desa Tanjung Keranjang yang mayoritas suku Dayak, tentu saja akan menggunakan, menganut, dan memegang nilai-nilai budaya sebagai pedoman hidup untuk membangun relasi sosial dan memperkuat hubungan-hubungan kekerabatan antar individu maupun antar kelompok masyarakat lainnya.

Selain itu, untuk memperkuat hubungan solidaritas sosial antar sesama masyarakat, serta memperkuat, dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di Desa Tanjung Keranjang, masyarakat suku Dayak membentuk suatu lembaga atau organisasi masyarakat suku Dayak yang dipimpin oleh ketua

adat. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah untuk memelihara hidup rukun di dalam persekutuan dan menjaga supaya norma hukum adat yang ada di desa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Lembaga adat tersebut memiliki struktur yang berfungsi untuk menjalankan mandat yang diperoleh dari masyarakat untuk mengatur dan bertanggung jawab atas setiap persoalan yang melanggar nilai-nilai budaya suku Dayak, termasuk juga memperhatikan dan menghargai nilai-nilai budaya masyarakat suku-suku lain yang ada di desa tersebut.

Dalam musyawarah dan pertemuan-pertemuan yang digelar oleh lembaga adat, umumnya membicarakan atau membahas persoalan-persoalan yang umum terjadi dalam masyarakat, antara lain konflik keluarga, konflik tanah, serta mempersiapkan kegiatan-kegiatan adat dan budaya serta ritual-ritual lain yang berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan kampung, harmoni dan lain sebagainya. Dalam setiap musyawarah adat umumnya dihadiri oleh kaum laki-laki yang dianggap sebagai representasi dari setiap keluarga. Ini sudah berlangsung lama.

Dalam musyawarah lembaga adat, laki-laki memperoleh peran yang cukup besar dalam kehidupan keluarga dan dipandang merepresentasikan keluarganya. Selain itu, hubungan-hubungan kekerabatan yang sangat kuat dan berlangsung dalam kehidupan sosial tersebut, secara tidak langsung peran-peran sosial yang dimiliki oleh laki-laki yang tercermin dari kehidupan keluarga, menempatkan laki-laki memiliki posisi sentral untuk membawa perubahan dalam keluarga. Maka secara otomatis posisi perempuan dalam

pertemuan maupun musyawarah adat tersebut tidak terlalu penting. Hal ini terjadi karena laki-laki dipandang sebagai representasinya keluarga untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam keluarga maupun dalam lembaga adat. Namun, perempuan dan anak-anak sewaktu-waktu diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang mewajibkan setiap keluarga untuk hadir, misalnya dalam musyawarah besar yang melibatkan seluruh warga masyarakat.

Salah satu ruang yang melibatkan semua warga adalah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu menjadi arena di mana setiap warga negara terlibat untuk menjalankan hak politiknya untuk menentukan pilihan terbaiknya. Pemilu sebagai arena strategis bagi setiap warga negara yang memiliki hak pilih untuk memilih calon pimpinan yang terbaik menjadi pemimpinnya masyarakat.

Salah satu agenda penting di desa Tanjung Keranjang tersebut yakni Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang diselenggarakan pada bulan Mei 2021 yang lalu. Proses dan mekanisme pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemilihan langsung lewat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam pemilihan Ketua RT, semua masyarakat yang memiliki hak pilih diberi kesempatan untuk memilih calon yang diharapkan mampu memimpin masyarakat di wilayah RT tersebut. Di Desa Tanjung Keranjang, terdapat empat RT yang baru saja menggelar pemilihan Ketua RT tersebut, yakni RT 001, RT 002, RT 003 dan RT 004.

Penyelenggaraan pemilihan Ketua RT di Desa Tanjung Keranjang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Ketua Rukun Tetangga Serentak. Pemilihan Ketua RT yang telah dilaksanakan di beberapa RT yang ada di beberapa desa di Kabupaten Malinau merupakan kontestasi penting. Hal ini terjadi karena di Kabupaten Malinau, Ketua RT memiliki peran serta tugas dan tanggung jawab yang penting sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Pemilihan Ketua RT di Kabupaten Malinau merupakan sebuah tonggak awal suksesnya pembangunan yang dimulai dari tingkat RT. Apalagi Pemerintah Kabupaten Malinau memberi kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk berperan langsung dalam pembangunan RT dan desanya masing-masing. Dengan demikian, RT merupakan sebuah kekuatan dalam pembangunan di Kabupaten Malinau. Artinya, terselenggaranya pemerintahan desa, berarti terselenggara juga pemerintahan atau kegiatan di tingkat RT. Jadi, RT merupakan basis pembangunan di Desa Tanjung Keranjang maupun di Kabupaten Malinau.

Pemilihan Ketua RT penting dilakukan karena RT merupakan bagian dari pemerintahan. Di Kabupaten Malinau, RT termasuk dalam tingkatan pemerintahan, dari kabupaten, kecamatan, desa lalu ke RT. Tidak ada yang namanya kelurahan dan RW. Di Kabupaten Malinau, peran Ketua RT sangat penting. Hal ini terjadi karena kepala desa langsung menugaskan Ketua RT

untuk mengatasi seluruh persoalan atau mengadakan kegiatan kemasyarakatan.

Rukun Tetangga berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa/kelurahan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Menurut Soekanto (2001: 218) Rukun Tetangga merupakan paguyuban karena tempat tinggal (*Gemeinschaft of place*) yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat dapat saling menolong. Rukun Tentangga (RT) lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan serta diatur dan dibina oleh pemerintah. Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

Pembentukan lembaga RT memiliki maksud dan tujuan untuk membantu pemerintah khususnya Kepala Desa/Lurah memelihara dan melestarikan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan berorientasi pada rasa kegotongroyongan, tolong menolong, serta didasarkan pada rasa kekeluargaan yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Walaupun organisasi RT bukan lembaga pemerintahan, namun dalam batas-batas tertentu berkewajiban memberi bantuan kepada aparaturn pemerintahan (Saparin, 1986: 66). Lembaga RT juga memiliki kewajiban selain dari tugas dan fungsi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni untuk membantu pemerintah bersama perangkat pemerintah daerah dalam

menjalankan pemerintahan daerah, khususnya membantu tugas tugas Kepala Desa/Lurah.

Agar RT dapat melakukan perannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang menunjang dalam membantu kelancaran pemerintahan dan terutama membantu memupuk mental ruang serasi dengan suasana hidup dan membina semangat gorong royong, maka RT itu sendiri perlu dibina oleh pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan. Masing-masing Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dipimpin oleh Ketua RW dan Ketua RT. Ketua RT memimpin warganya dalam periode tertentu. Ketua RT dapat dipilih secara langsung atau lewat musyawarah mufakat oleh masyarakat yang berada dalam lingkup wilayahnya.

Jika dipahami seperti itu, maka pemilihan Ketua RT merupakan agenda yang ditetapkan pemerintah. Agenda kegiatan pemerintah memerlukan keterlibatan semua pihak baik laki-laki maupun perempuan dewasa. Sebab baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak sebagai warga negara. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Ketua RT dipandang penting karena mereka adalah subjek politik. Dengan begitu, keterlibatan mereka dalam pemilihan Ketua RT berarti mengaktifkan status mereka sebagai subjek politik. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjalankan haknya dalam memilih Ketua RT guna mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hidup masyarakat.

Dalam agenda pemilihan Ketua RT, keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat menjadi faktor penting. Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat menjadi penting karena masyarakatlah yang akan menentukan pemimpin untuk menjadi Ketua RT di wilayahnya. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Ketua RT diharapkan mampu menghadirkan sebuah keputusan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan bersama. Pemilihan Ketua RT merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dalam menghasilkan Ketua RT terpilih yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan. Sebab masyarakat adalah komponen penting dalam demokrasi.

Bagi penulis, Pemilihan Ketua Rukun Tetangga di Desa Tanjung Keranjang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih jauh. Penulis ingin melihat hubungan budaya politik masyarakat dengan perilaku memilih dalam pemilihan Ketua RT. Sebab sebagaimana yang telah disinggung di muka, masyarakat Desa Tanjung Keranjang mayoritas berasal dari Suku Dayak, yang selalu taat pada norma adat, kuat dalam hubungan kekerabatan dan setia menjaga nilai-nilai sosial yang bersumber pada budayanya. Lantas pertanyaannya adalah apakah budaya politik dan perilaku pemilih memiliki hubungan dalam memilih dan menentukan Ketua RT?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana Budaya dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Tanjung Keranjang dalam Pemilihan Ketua RT?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan maka tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai agar penelitian ini dapat berguna. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis budaya politik masyarakat Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; dan
2. Menganalisis perilaku memilih masyarakat Desa Tanjung Keranjang, dalam pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kontribusi daam dua hal, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan budaya dan perilaku memilih.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memahami perilaku memilih masyarakat yang secara khusus memiliki kesetiaan pada norma adat serta memiliki hubungan sosial dan kekerabatan yang sangat kuat dalam menentukan pilihan politiknya terutama pada pemilihan umum.

E. Literature Review

Penelitian yang baik adalah penelitian yang otentik. Penelitian yang otentik adalah penelitian yang memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya. Terdapat beberapa penelitian yang dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Haryanto pada tahun 2014 yang berjudul “*Kebangkitan Partai ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi partai (*party ID*) telah menjadi faktor utama perilaku memilih dalam politik lokal di Indonesia. Dengan begitu, pemilih tidak lagi dominan melihat faktor kedekatan (*proximity*), baik kedekatan etnis maupun daerah dalam menentukan pilihan suara, sebagaimana kesimpulan umum selama ini digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih dalam politik lokal di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa pemilih cenderung mengidentifikasi diri dengan partai, kemudian menentukan pilihan suaranya kepada kandidat yang diusung oleh partainya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Imanuel N. Tadanugi pada tahun 2015 yang berjudul “*Budaya Politik Lokal pada Pilkades di Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Tahun 2010*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum suksesi kepemimpinan lokal di Kecamatan Lage positif dan relatif demokratis. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa tidak terjadi diskriminasi dalam pencalonan, baik karena faktor agama, afiliasi politik, etnis, maupun jenis kelamin. Ini berarti bahwa semua warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri sebagai kandidat. Meskipun demikian, Pilkades di Kecamatan Lage tetap berpotensi menciderai demokrasi. Hal ini terjadi karena dua hal, yaitu: a) Munculnya calon tunggal. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dari 16 desa yang melaksanakan Pilkades, ada 2 desa yang hanya memiliki satu calon. Meskipun waktu pendaftaran sudah diundur, tidak ada warga masyarakat yang “berani” mendaftarkan diri sebagai kandidat. Hal ini terjadi karena tingginya biaya politik (*political cost*) yang harus ditanggung para calon. b) Maraknya isu *money politics*. Berkaitan dengan *money politics*, meskipun sulit dibuktikan, namun sejarah Panjang dinamika politik di Kabupaten Poso, terutama di Kecamatan Lage mengungkapkan bahwa *money politics* berjaln kelindan dengan dinamika politik termasuk Pilkades. Dalam rangka meminimalisir kedua hal ini, peneliti menganjurkan agar pendidikan politik dilakukan secara terus-menerus sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arga Sevtyan, Wawan Sobari, dan Hilmi Mochtar pada tahun 2018 yang berjudul “*Perilaku Gumunan: Rasionalitas Semu Pemilih Jawa*”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perilaku pemilih jawa melalui pendekatan sosio-kultural dalam Pemilukada Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Trenggalek yang merupakan suku jawa yang menganut budaya mataraman dengan nilai feodalistik. Dengan begitu, perilaku “gumunan” masih melekat pada diri masyarakat. Perilaku “gumunan” dalam falsafah jawa berarti mudah kagum dan heran pada kekayaan, kecerdasan, dan kebangsawanan orang lain. Dalam konteks Pemilukada Trenggalek, perilaku pemilih “gumunan” berarti masyarakat cenderung mudah terkesan pada janji kampanye dan penampilan luar kandidat namun tidak mampu menilai apakah itu rasional atau tidak untuk kesejahteraan. Sikap “gumunan” dipengaruhi oleh perilaku afektif yang mencakup cara menilai sesuatu secara emosional, seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasime, motivasi, dan sikap. Hal ini menjadikan rasionalitas semu pada pemilih jawa.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Fatimah Nasution pada tahun 2021 yang berjudul “*Perilaku Memilih Masyarakat Mandailing Natal Pada Pemilihan Kepala Desa*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku dan rasionalitas memilih dan masyarakat di Desa Iparbondar dalam Pilkades 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Iparbondar cenderung menentukan pilihan berdasarkan pendekatan sosiologis yaitu kekerabatan. Ini berarti keluarga dan politik

berjalin kelindan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Posisi politik seseorang atau kelompok tertentu dapat ditentukan oleh koneksi keluarga yang kuat. Keluarga memiliki peran melahirkan seorang pemimpin politik dengan berbagai macam bentuk dana maupun moril.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Saleh dan Achmat Munif yang berjudul “*Membangun Karakter Budaya Politik dalam Berdemokrasi*” pada tahun 2015. Dijelaskan bahwa kejadian pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia merupakan amanah dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Meski sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa pergantian Presiden RI pertama kali dari Ir. Soekarno hingga presiden yang ketujuh yaitu Jokowi, selalu terdapat kejadian tidak semestinya oleh elit “pemimpin negara” dan hal ini akan menjadi cermin bagi rakyat Indonesia bagaimana membangun karakter budaya politik. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman pada saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi politik masyarakat sangat membantu berkembangnya budaya politik dalam suatu negara. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Demokrasi merupakan media untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kalau demokrasi ditegakkan dengan tingginya partisipasi rakyat dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya maka masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud. Yang tidak kalah penting adalah membangun karakter budaya politik, sehingga kegiatan politik bukanlah

panggung bermain bagi para elit penguasa tetapi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dalam menciptakan kemaslahatan bersama.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Yana Suryana yang berjudul “*Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik*” pada Tahun 2020. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah tentang budaya politik dalam menyikapi pemilihan umum serentak 2020. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui efektivitas pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 dari sudut pandang perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Responden penelitian ini adalah anggota dasawisma sebanyak 20 orang. Data diperoleh dari angket dan wawancara dengan menggunakan analisis data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki ketertarikan terhadap proses pemilu serentak 2019. Budaya politik partisipan sudah berkembang karena beberapa faktor yaitu: sosial, pendidikan, dan sosialisasi pemilu. Hasil estimasi mampu ditoleransi kesalahannya tidak lebih dari 5%. Nilai probabilitas 0,0012 berarti pelaksanaan pemilihan umum serentak berpengaruh signifikan terhadap perubahan budaya politik masyarakat. Upaya peningkatan perbaikan pemilu serentak sebesar 1% akan mempengaruhi peningkatan budaya politik sebesar 8%. Walaupun begitu pemilu serentak tetap harus diperbaiki sehingga partisipasi perempuan tetap bisa tinggi dalam pemilu yang akan datang.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Erna Febriani pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Perilaku Memilih (Voting Behavior) Pemilih Pemula*”

Wilayah Jakarta Barat Menjelang Pemilihan Umum 2019” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional terhadap perilaku pemilih pemula di wilayah Jakarta Barat dalam menentukan pilihan politiknya ada pemilihan umum. Secara parsial, faktor yang mempengaruhi perilaku memilih pemilih pemula Jakarta Barat adalah pilihan rasional, sedangkan faktor sosiologis dan psikologis tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih pemilih pemula di wilayah Jakarta Barat. Peneliti berharap kesimpulan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan atau pendidikan politik untuk pemilih pemula di wilayah Jakarta Barat dengan mengarahkan kepada bentuk-bentuk partisipasi politik aktif dan melibatkan diri dalam mengawasi proses politik menjelang pemilihan umum 2019. Pengaruh pilihan rasional pemilih pemula perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi politik yang sehat dan cerdas untuk dapat mengarahkan pemilih pemula memberikan suara kepada calon yang cakap dan memberikan hasil terbaik bagi bangsa dan mendorong bangsa mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia internasional.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ira Indra Gerungan yang berjudul” *Perilaku Memilih Masyarakat Desa Touliang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015*” pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan untuk menelisik lebih jauh terkait fenomena Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak di seluruh Indonesia yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, masyarakat di Kecamatan Kakas Barat Desa Touliang tidak semua

memberikan hak pilih. Menurut penulis hal ini sangat menarik untuk diteliti untuk mengetahui berbagai faktor atau alasan yang mempengaruhi pemilih maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari pemilu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Desa Touliang Kakas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 yaitu 1) faktor pemerintah; 2) faktor penyelenggara pemilu; 3) faktor partai politik; 4) terbentuknya antusiasme; 5) peran media massa; 6) peran kandidat; dan 7) faktor sosial budaya.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichawanuddin yang berjudul “*Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2004*” pada Tahun 2015. Gagasan utama kajian ini adalah untuk memahami kecenderungan partisipasi politik dan perilaku memilih pada pemilu 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal yaitu faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional terhadap perilaku memilih pemilih Indonesia. Kajian ini juga memetakan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dan perilaku memilih dalam pemilu 2014.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustanir dan Irfan Jaya yang berjudul “*Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Politik Terhadap Pemilih Towani Tolotang di Kecamatan Maritengnae, Kabupaten Sidenreng Rappang*” pada Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku pemilih di Towani Tolotang, terutama pengaruh budaya politik terhadap budaya politik memilih di

Kecamatan Maritengnae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Konklusi yang berkaitan dengan budaya politik dalam penelitian ini adalah bahwa pengaruh budaya politik berpengaruh terhadap perilaku memilih Towani Tolotang di Kecamatan Meritengnae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dilihat dari hasil olah angket dari setiap indikator pertanyaan sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku memilih Towani Tolotang di Kecamatan Meritengnae, Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 69%, di mana ini tergolong dalam kategori berpengaruh.

Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai relevansi dengan studi-studi di atas. Baik penelitian yang dilakukan peneliti maupun penelitian terdahulu berikhtiar untuk menelisik tentang budaya politik dan perilaku memilih masyarakat. Namun, penelitian-penelitian terdahulu lebih menfokuskan kajiannya pada dinamika politik dengan skala yang lebih luas, seperti desa, daerah (kabupaten dan provinsi), serta nasional. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan kajian pada dinamika politik dinamika politik paling mikro yaitu dinamika pemilihan Ketua RT. Dengan berkaca pada penelitian terdahulu, maka penelitian ini merupakan sesuatu yang baru dalam kajian ilmu pemerintahan maupun politik. Oleh karena itu, penelitian ini berikhtiar untuk menghadirkan kebaruan dalam diskursus ilmu pemerintahan maupun politik.

Dari kesepuluh jurnal yang telah penulis review maka penulis mengambil dua jurnal yang relevan untuk membahas dan melakukan kajian dalam skripsi

ini yang berhubungan dengan budaya politik dan perilaku memilih, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Fatimah Nasution pada tahun 2021 yang berjudul “*Perilaku Memilih Masyarakat Mandailing Natal Pada Pemilihan Kepala Desa*” dan penelitian yang dilakukan oleh Ira Indra Gerungan yang berjudul “*Perilaku Memilih Masyarakat Desa Touliang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015*” pada tahun 2015. Terutama dalam menggunakan teori untuk menjelaskan fenomena sosial masyarakat dalam keterlibatan masyarakat pada saat proses musyawarah dan rapat adat serta proses partisipasi politik dalam menentukan pilihan-pilihan politik khususnya Pemilihan Ketua RT tahun 2021 di Desa Tanjung Keranjang.

F. Kerangka Konseptual

1. Budaya Politik

Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian budaya dan politik. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhayah, bentuk jamak dari budhi yang artinya akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi. Kebudayaan adalah segala yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan kemampuan akalnya. Ciri-ciri umum dari kebudayaan adalah dipelajari, diwariskan, dan diteruskan, hidup dalam masyarakat, dikembangkan dan berubah, serta terintegrasi. Sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam

negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Berikut beberapa definisi tentang budaya politik menurut para ahli: *Pertama*, menurut Rusadi Kantaprawira (2006: 25), budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Kedua, menurut Mochtar Masoed dan Colin MacAndrew (2000), budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintah negara dan politiknya. Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: budaya politik tidak menekankan persoalan pada perilaku aktual warga negara yang berupa tindakan, melainkan lebih menekankan persoalan pada perilaku nonaktual yang berupa orientasi, misalnya sikap, nilai, pengetahuan, kepercayaan, dan penilaian warga terhadap suatu objek politik. Budaya politik menggambarkan orientasi politik warga negara dengan jumlah besar bukan perseorangan. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah

sistem politik dan objek pembicaraan warga negara adalah kehidupan politik pada umumnya.

Sementara itu, Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem politik. Gabriel A. Almond mengajukan pengklasifikasian budaya politik sebagai berikut:

1. Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah);
2. Budaya politik kawula atau subyek, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif; dan
3. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Konsep budaya politik mencakup banyak aspek dalam fenomena politik, tradisi politik, dan cerita kepahlawanan rakyat, semangat institusi publik, politik kewargaan, tujuan yang diartikulasikan sebuah ideologi politik, aturan main politik formal ataupun non-formal, stereotip, gaya, moda, dan langgam pertukaran politik, dan sebagainya.

Untuk itu dari ketiga definisi dari para ahli tentang budaya politik yang telah disebutkan di atas maka peneliti memilih definisi tentang budaya politik menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, dimana definisi budaya politik ini untuk memahami budaya politik yang berlaku dalam

masyarakat Desa Tanjung Keranjang yang menjadikan norma-norma aturan adat untuk mengatur relasi baik individu maupun komunitas luas, terutama dalam hal proses pengambilan keputusan yang berlaku sebagai sebuah aturan yang ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat termasuk dalam hal ini keterlibatan atau partisipasi untuk turut ambil bagian dalam musyawarah atau pertemuan adat.

2. Perilaku Pemilih

Dalam konteks pemilihan umum, perilaku memilih merupakan suatu tindakan yang bersifat individual, ini disebabkan adanya otoritas penuh kepada individu yang telah memenuhi persyaratan khusus sebagai warga negara untuk menentukan sendiri pilihan politiknya dalam hal ini pemberian suara (*voting*). Perilaku memilih merupakan salah satu bentuk perilaku politik dalam sebuah pemilihan umum. Menurut Jack Plano dalam Erna Febriani (2018: 5), perilaku memilih merupakan suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan itu.

Penjelasan lain mengenai perilaku memilih adalah sebagai suatu aktifitas pemberian suara oleh individu, perilaku pemilih dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik. Samuel P. Huntington dalam Ira Indra Gerungan (2015:3-4) berpendapat bahwa perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satu

wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup “suara”, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Menurut Ramlan Subakti (dalam Gerungan, 2015: 3-4), perilaku memilih adalah “aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”. Perilaku memilih dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih. Pengelompokan sosial ini misalnya berdasarkan umur, jenis, kelamin, agama, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Untuk itu pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi keagamaan, organisasi profesi dan sebagainya, maupun kelompok informal seperti keluarga, pertemanan atau kelompok-kelompok kecil lainnya. Hal ini merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini

mempunyai peranan besar dalam bentuk sikap persepsi dan orientasi seseorang. Jadi, keanggotaan seseorang kepada kelompok-kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi seseorang di dalam menentukan pilihannya pada saat pemilu.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis adalah ilmu sifat dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari tingkah laku dan aktifitas masyarakat di pengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum sehingga ilmu politik berhubungan sangat dekat dengan psikologis. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk memperjelas perilaku pemilih. Para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam perilaku politiknya.

3. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional adalah menjelaskan bahwa kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suarnya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan

pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Jadi, pemilih mempertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Sedangkan menurut Firmanzah dalam Ira Indra Gerungan (2015: 4-6), perilaku pemilih diklasifikasikan dalam tiga jenis. Adapun tiga jenis perilaku pemilih tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilih Rasional

Dalam konfigurasi pertama terdapat pemilih rasional (*rational voter*), dimana pemilih memiliki orientasi tinggi pada *policy-problem solving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Ciri khas pemilih jenis ini adalah tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Faktor seperti faham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan dibandingkan paham dan nilai partai dan kontestan. Oleh karena itu, ketika sebuah partai politik atau calon kontestan ingin menarik perhatian pemilih dalam matriks ini, mereka harus mengedepankan

solusi logis akan permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial-budaya, hubungan luar negeri, pemerataan pendapatan, disintegrasi nasional, dan lain-lain. Pemilih tipe ini tidak akan segan-segan beralih dari sebuah partai atau seorang kontestan ke partai politik atau kontestan lain ketika mereka dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan.

2. Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah *rational voter* untuk berpaling ke partai lain. Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme. *Pertama*, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik dan kandidat mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga terjadi sebaliknya, pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini akan selalu

menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Tiga kemungkinan akan muncul ketika terdapat perbedaan antara nilai ideologi dengan platform partai yaitu memberikan kritik internal, frustrasi, dan membuat partai baru yang memiliki kemiripan karakteristik ideologi dengan partai lama. Kritik internal merupakan manifestasi ketidaksetujuan akan sebuah kebijakan partai politik atau seorang kontestan. Ketika pemilih merasa kritiknya tidak difasilitasi oleh mekanisme internal partai politik, mereka cenderung menyuarakannya melalui mekanisme eksternal partai, umpamanya melalui media massa seperti televisi, radio, dan sebagainya. Frustrasi merupakan posisi yang sulit bagi pemilih jenis ini. Di satu sisi, mereka merasa bahwa ideologi suatu partai atau seorang kontestan adalah yang paling sesuai dengan karakter mereka, tapi di sisi lain mereka merasakan adanya ketidaksesuaian dengan kebijakan yang akan dilakukan partai atau kandidat tersebut. Biasanya pemilih ini akan melihat-lihat dahulu (*wait and see*) sebelum munculnya ide kemungkinan yang ketiga, yaitu membentuk partai baru. Pembuatan partai biasanya harus dipelopori oleh tokoh-tokoh yang tidak puas atas kebijakan suatu partai. Mereka memiliki kemampuan untuk menggalang massa, ide, konsep, dan reputasi untuk membuat partai tandingan dengan nilai ideologi yang biasanya tidak berbeda jauh dengan partai sebelumnya.

3. Pemilih Tradisional

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budayanya, nilai, asal-usul, faham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih suatu partai politik. Kebijakan semisal ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan, serta pembangunan dianggap sebagai parameter kedua. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta faham yang dianut.

Pendekatan sosiologis yang dimaksudkan oleh Ramlan Subakti tentang perilaku memilih masyarakat dan pendapat Firmanzah tentang pemilih tradisional dipakai untuk melihat perilaku memilih dalam pemilihan ketua RT (Rukun Tetangga) tahun 2021 di Desa Tanjung Keranjang.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini, secara singkat dapat dijelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti, yaitu

1. Budaya politik parochial, dimana tingkat partisipasi politik Masyarakat Desa Tanjung Keranjang sangat rendah, yang disebabkan oleh faktor kognitif; dan
2. Pendekatan sosiologis dipakai untuk melihat perilaku Memilih Masyarakat Desa Tanjung Keranjang dalam Pemilihan Ketua RT.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai metode dalam meneliti penelitian ini, sebagai suatu metode yang digunakan untuk memberikan pemaparan serta penjelasan terkait kegiatan atau objek yang diteliti, yang berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih merinci atau membedakannya dengan fenomena lain (Denzim dan Lincoln, 2009:223).

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dimaksudkan guna mendeskripsikan atau memaparkan suatu objek masalah dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai objek penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

3. Unit analisis

a. Objek Penelitian

Objek merupakan batasan dalam penelitian yang dikaji, objek dalam penelitian ini adalah budaya dan perilaku memilih masyarakat Desa Tanjung Keranjang dalam pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) tahun 2021.

b. Subjek Penelitian

Sedangkan subjek merupakan informan atau narasumber dalam penelitian, untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, maka perlu menentukan subjek penelitian yang diambil. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Tanjung Keranjang;
2. Tokoh adat atau dewan adat;
3. Calon ketua RT terpilih dan tidak terpilih, dan;
4. Perwakilan masyarakat sebanyak 5 orang dari setiap RT.

I. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti akan mengadakan pengamatan langsung dilapangan atau lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti. Adapun tujuan observasi adalah mengamati secara langsung kegiatan

keseharian manusia, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Dalam menentukan hal-hal yang hendak diamati, peneliti harus mengamati kembali kepada masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, dalam hal ini adalah budaya dan perilaku memilih masyarakat Desa Tanjung Keranjang.

2. Wawancara

Kegiatan wawancara (*interview*) melakukan kegiatan berbicara dan mendengarkan, dan terkadang narasumber atau informan berbicara. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab. Sebagai peneliti, pewawancara harus memahami tujuan peneliti melakukan wawancara. Dalam wawancara informan tetap menjadi sentral, walaupun narasumber atau informan akan berganti-ganti (Burhan Bungin, 2007).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dilakukan untuk mengkolerasi data-data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen berupa keterangan mengenai peristiwa yang menjadi fokus penelitian.

Pada penelitian ini beberapa dokumentasi berupa data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Profil Kabupaten Malinau dan Desa Tanjung Keranjang;
- b. Data pemilihan ketua RT tahun 2021;
- c. Dokumen photo; dan
- d. Dan data serta informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Dalam teknik ketiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan serentak dengan proses pengumpulan data, dalam bentuk sirkus selama proses penelitian. Untuk lebih jelasnya tiga komponen dalam model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:338), yang meliputi:

1. Reduksi Data (Pengumpulan Data)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Data Display (Penyajian Data)

Pada proses ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki

makna tertentu dengan cara menampilkan dan membuat hubungan variable agar peneliti lain atau pembaca laporan penelitian mengerti apa yang telah terjadi dan apa yang perlu di tindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penampilan atau display data yang baik tampak jelas alur pikirnya, adalah merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap peneliti karena dengan display yang baik merupakan satu langkah penting untuk mencapai analisis kualitatif yang valid dan handal.

3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia penulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dalam peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.

BAB II

PROFIL DESA TANJUNG KERANJANG

A. Sejarah Desa

Desa Tanjung Keranjang adalah sebuah desa hasil pemekaran dari Desa Malinau Kota. Desa Tanjung Keranjang berdiri pada tanggal 25 Oktober 2005. Sebelum ditetapkan menjadi desa, Desa Tanjung Keranjang adalah salah satu RT dari Desa Malinau Kota yaitu RT VI Malinau Kota.

Seiring dengan perubahan tata pemerintahan di wilayah Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, dan atas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau serta dukungan dari lapisan masyarakat, Desa Malinau Kota telah dimekarkan menjadi desa definitif, yang terdiri Desa Tanjung Keranjang, Desa Malinau Hulu, Desa Malinau Hilir (Trans).

Nama Dusun Tanjung Keranjang kala itu, kini menjadi desa definitif yaitu Desa Tanjung Keranjang. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 303 Tanggal 24 Oktober 2005 tentang Pembentukan Desa Definitif hasil pemekaran Desa di Kabupaten Malinau tahun 2005. Keputusan tersebut berlaku sejak 26 Oktober 2005. Dengan demikian, sejak tanggal 26 Oktober 2005 RT VI Tanjung Keranjang berubah secara resmi menjadi Desa Definitif dengan nama Desa Tanjung Keranjang. Untuk selanjutnya yang dulunya hanya 1 RT dimekarkan menjadi 2 RT.

Setelah dinyatakan dan disahkan menjadi desa definitif, selanjutnya persiapan pembentukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dengan serangkaian proses Perekrutan Anggota BPD yang baru, mulai dari membuka pendaftaran, penjangkaran, penetapan BPD Desa Tanjung Keranjang periode tahun 2006-2012, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Malinau tertanggal 18 April 2006 Nomor 205 Tahun 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota BPD Desa Malinau Hulu, Desa Malinau Hilir, Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau kota.

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan nama-nama anggota BPD pada awal pembentukan Desa Tanjung Keranjang.

Tabel 2.1 Anggota BPD Tanjung Keranjang

No	Nama	Jabatan
1	Anim Beran	Ketua
2	Yusak Ivung	Wakil Ketua
3	Silas Liling	Sekretaris
4	Aspuri	Anggota
5	Lewi, SE	Anggota

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021

Selanjutnya, BPD Tanjung Keranjang membentuk panitia pemilihan Pejabat Sementara Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Pejabat Sementara Kepala Desa telah melaksanakan pembukaan pendaftaran, penjangkaran, penetapan calon Pejabat Sementara Kepala Desa.

Akhirnya ditetapkan nama Pjs Kepala Desa yaitu Bapak Hang Usat dengan masa jabatan tahun 2005-2006.

Selama kepemimpinan Pejabat Sementara Kepala Desa di Desa Tanjung Keranjang telah menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagaimana mestinya. Dukungan dari berbagai pihak, masyarakat dan pemerintah turut memperlancar jalannya Pemerintahan Desa. Kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Malinau Kota. Pemerintah Kabupaten Malinau memberikan dukungan sepenuhnya kepada desa-desa di Kabupaten Malinau untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sarana lainnya di desa.

Pada Tahun 2006 telah diselenggarakan pemilihan Kepala Desa definitif untuk masa bakti tahun 2006-2012, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Malinau tertanggal 1 November 2006 Nomor 509 Tahun 2006 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Malinau Tahun 2006. Maka tugas Pejabat Sementara Kepala Desa telah berakhir, selanjutnya dilanjutkan oleh Kepala Desa Definitif yaitu Bapak Saul Laing.

Pada tahun 2012 Desa Tanjung Keranjang mengalami pergantian kepala desa berdasarkan pemilihan Kepala Desa Periode 2012 - 2018, dan yang terpilih adalah Bapak Untung Kurang. Karena perkembangan kebutuhan pelayanan pemerintahan desa makin meningkat, serta pertumbuhan jumlah

penduduk makin bertambah, maka pada tahun 2012 secara administratif dilakukan pemekaran wilayah 2 RT menjadi 4 RT.

Selanjutnya, setelah masa jabatan Kepala Desa periode 2012-2018 berakhir, sempat terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Tanjung Keranjang tahun 2018 hingga tahun 2019, maka oleh Bupati Malinau, ditunjuklah Sekretaris Camat Malinau Kota Bapak Fatah Dwi Priyono, S.IP. M.Si. sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Tanjung Keranjang hingga dipilih dan dilantiknya Kepala Desa yang baru. Setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa berikutnya dan yang terpilih adalah bapak Jeri Martinus, SE untuk periode 2019-2024.

Saat ini Kantor Kepala Desa Tanjung Keranjang memiliki 7 orang Staf dan 1 orang Sekretaris Desa yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa Tanjung Keranjang.

Tabel 2.2 Daftar Kepala Desa Tanjung Keranjang

No	Nama	Masa Bakti	Keterangan
1	Hang Usat	2005-2006	Pjs Kepala Desa
2	Saul Laing	2006-2012	Kepala Desa
3	Untung Kurang	2012-2018	Kepala Desa
4	Fatah Dwi Priyono, S.IP. M.Si.	2018-2019	Pjs Kepala Desa
5	Jeri Martinus, SE	2019-2024	Kepala Desa

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021

B. Kondisi Geografis

Desa Tanjung Keranjang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Secara geografis, kondisi Desa Tanjung Keranjang yang sangat menguntungkan karena didominasi oleh wilayah daratan yang luasnya mencapai $\pm 20.855 \text{ Km}^2$.

Secara administratif Desa Tanjung Keranjang memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Batas Desa Tanjung Keranjang

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Malinau Hilir	Malinau Kota
2	Sebelah Timur	Desa Seputuk	Sesayap, KTT
3	Sebelah Selatan	Desa Batu Lidung	Malinau Kota
4	Sebelah Barat	Desa Batu Lidung & Malinau Kota	Malinau Kota

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa letak Desa Tanjung Keranjang boleh dibilang cukup strategis karena berada di antara empat desa. Letaknya yang cukup strategis memudahkan Desa Tanjung Keranjang dalam menjalankan berbagai urusan untuk menunjang kemajuan dan perkembangan desa. Dengan keadaan seperti ini, Desa Tanjung Keranjang dapat melakukan kerjasama antardesa untuk mengembangkan pembangunan kawasan desa. Misalnya,

membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama desa-desa tetangga.

C. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : ± 7 Km.
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : ± 9 Km.
- c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : ± 7 Km.
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : ± 120 Km.

Data di atas menunjukkan bahwa akses masyarakat Desa Tanjung Keranjang ke pusat kecamatan, pemerintahan kota, ibu kota kabupaten dan ibu kota cukup mudah. Artinya, masyarakat tidak terlalu akan menguras waktu, tenaga, dan biaya yang banyak untuk mengakses tempat-tempat ini. Hal ini juga didukung oleh keberadaan sarana transportasi yang sangat memadai di Desa Tanjung Keranjang. Kemudahan akses seperti ini akan membantu masyarakat Desa Tanjung Keranjang untuk mengurus berbagai kepentingan, baik berkaitan dengan administrasi maupun agenda pembangunan di desa.

D. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Desa Tanjung Karang terdiri dari 167 kepala keluarga (KK). Dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2020 perkembangan penduduk di Desa Tanjung Keranjang per Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	350 jiwa	52,47
2	Perempuan	317 jiwa	47,52
Total		667 jiwa	100

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa kuantitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dengan kalimat lain, penduduk Desa Tanjung Keranjang didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Dalam tradisi masyarakat suku Dayak di Desa Tanjung Keranjang hampir berimbang perempuan masih dijadikan sebagai masyarakat kelas dua. Hal itu tercermin dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh lembaga adat. Dalam musyawarah tersebut, laki-laki memainkan peran penting karena mereka dianggap sebagai representasi keluarganya masing-masing. Sementara perempuan bukanlah aktor yang penting dalam

pengambilan keputusan sekalipun keputusan tersebut berdampak pada kehidupan mereka. Dengan kalimat lain, kaum perempuan tereksklusi dari forum musyawarah yang diselenggarakan oleh lembaga adat. Persis, pada titik ini kita dapat mengetahui betapa eksklusifnya paguyuban suku Dayak dalam musyawarah adat

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Tanjung Keranjang berdasarkan usia.

Tabel 2.5 Penduduk Berdasarkan Usia

No	Umur					Jumlah Penduduk
		Perempuan	%	Laki-laki	%	
1	0 – 4 Thn	22	6.94%	21	6%	43
2	5 - 9 Thn	37	11.67%	36	10.28%	73
3	10 – 14 Thn	27	8.51%	25	7.14%	52
4	15 – 19 Thn	32	10.09%	32	9.14%	64
5	20 – 24 Thn	22	6.93%	38	11.98%	60
6	25 – 29 Thn	35	11.04%	27	7.71%	62
7	30 – 34 Thn	31	9.77%	28	8%	59
8	35 – 39 Thn	27	8.51%	35	10%	62
9	40 – 44 Thn	14	4.41%	33	9.42%	47
10	45 – 49 Thn	18	5.67%	22	6.28%	40
11	50 – 54 Thn	15	4.73%	15	4.28%	30
12	55 – 59 Thn	16	5.04%	16	4.57%	32
13	60 – 64 Thn	4	1.26%	5	1.42%	9

14	65 – 69 Thn	6	1.89%	9	2.57%	15
15	70 – 74 Thn	3	0.94%	2	0.57%	5
16	Lebih dari 75	8	2.52%	6	1.71%	14
Jumlah		317	100%	350	100%	667

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021

Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa Desa Tanjung Keranjang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat memadai untuk menopang pembangunan desa. Apabila memakai logika penduduk dengan usia produktif (15-60 tahun), maka penduduk usia produktif Desa Tanjung Keranjang berjumlah 456 jiwa (68%) dengan rincian penduduk berjenis kelamin perempuan dengan usia produktif berjumlah 210 jiwa (31,48%) dan penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan usia produktif berjumlah 246 jiwa (36,88%).

Dengan formasi seperti ini, maka cita-cita untuk menjadikan Desa Tanjung Keranjang sebagai entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Desa Tanjung Keranjang perlu mengembangkan pola pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pola pembangunan yang menekankan keterlibatan semua elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasi kegiatan. Singkatnya, Pemerintah Desa Tanjung Keranjang menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan jumlah penduduk Desa Tanjung Keranjang berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.6 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Belum Sekolah	39	44	83
2	Tidak Tamat SD	18	15	33
3	Belum Tamat SD	34	40	74
4	Tamat SD/ sederajat	65	49	114
5	Tamat SMP/ Sederajat	51	38	89
6	Tamat SMA/ sederajat	93	81	174
7	Tamat D-I/II	6	0	6
8	Tamat D-3/ sederajat	9	16	25
9	Tamat S-1/ sederajat	30	33	63
10	Tamat S-2/ sederajat	5	1	6
Jumlah		350	317	667

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa, secara kuantitas, sumber daya manusia di Desa Tanjung Keranjang mempunyai cukup memadai untuk menopang pembangunan desa. Namun, kuantitas ini tidak dibarengi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data di atas menunjukkan

bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Keranjang masih sangat rendah.

Desa Tanjung Keranjang didominasi oleh masyarakat yang hanya mengakses pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang berjumlah 174 jiwa atau sekitar 26,08% dari total penduduk. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa di Desa Tanjung Keranjang masih terdapat 114 jiwa atau 17,09% dari total penduduk, yang hanya mengakses pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Dasar.

Dengan kenyataan ini, maka program pembangunan di Desa Tanjung Keranjang mesti diarahkan pada pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial ini bisa diaplikasikan melalui skema pemberdayaan masyarakat misalnya menelurkan program-program pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pembangunan di Desa Tanjung Keranjang.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan jumlah penduduk Desa Tanjung Keranjang berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian.

Tabel 2.7 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Belum/Tidak Bekerja	86	54	140

2	Pelajar/Mahasiswa	101	95	196
3	IRT	-	101	101
4	Petani/Pekebun	49	24	73
5	<i>S</i> Pedagang	1	2	3
7	<i>u</i> Wiraswasta	11	2	13
8	<i>m</i> Buruh Harian Lepas	9	-	9
10	<i>b</i> Kepolisian	2	-	2
11	<i>e</i> Pegawai Negeri Sipil	35	14	49
12	<i>f</i> Karyawan Honorer	7	11	18
13	<i>g</i> Karyawan Swasta	42	5	47
14	Pensiunan	2	1	3
15	<i>p</i> Lainnya	5	8	13
	<i>r</i> Total	350	317	667

*of*Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Keranjang sangat bervariasi. Mata pencaharian yang bervariasi ini menunjukkan bahwa Desa Tanjung Keranjang merupakan salah satu desa sub-urban. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa terdapat 140 jiwa atau sekitar 20,98% dari total penduduk Desa Tanjung Keranjang yang belum bekerja. Hal ini menegaskan bahwa salah satu persoalan dasar yang ada di Desa Tanjung Keranjang adalah pengangguran.

Dengan keadaan seperti ini, maka pembangunan di Desa Tanjung Keranjang mesti diarahkan pada pembangunan sosial melalui skema pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan berarti masyarakat diberi kuasa dan daya agar dapat mengakses dan melibatkan diri dalam setiap agenda pembangunan desa. Hal ini bisa diaplikasikan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, bahkan sampai pada redistribusi sumber daya secara adil dan merata kepada masyarakat.

E. Kelembagaan Desa

1. Struktur Pemerintah Desa Tanjung Keranjang

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Penyelenggara pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus warganya (Widjaja, 2003: 3).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Adapun perangkat desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana

teknis. Jadi, kesatuan antara Kepala Desa dan perangkat Desa itulah yang disebut dengan pemerintah desa. Dengan kalimat lain, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Meskipun desa bukan hanya sekadar pemerintahan desa, bukan hanya sekadar pemerintah desa serta bukan hanya sekadar kepala desa, tetapi kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya, kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi, dan melayani warga masyarakat (Sutoro Eko, dkk, 2014: 158). Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pemimpin struktur pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan perangkat desa.

Struktur organisasi pemerintah menggambarkan tentang pembagian kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab, baik kepada unit-unit kerja maupun perorangan dalam organisasi pemerintahan desa. Selain itu, struktur organisasi juga menggambarkan tata kerja yang memberi

kejelasan alur perintah, koordinasi, dan tanggung jawab baik secara hierariki-vertikal maupun relasi-horizontal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menentukan secara implisit tentang struktur organisasi tersebut yang tergambar dari ketentuan mengenai: (1) kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa; dan (2) susunan perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan teknis. Meskipun demikian UU Nomor 6 Tahun 2014 tidak menentukan secara eksplisit mengenai struktur organisasi pemerintah desa, tetapi mendelegasikan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada peraturan pemerintah.

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan struktur Pemerintah Desa Tanjung Keranjang.

Tabel 2.8 Struktur Pemerintah Desa Tanjung Keranjang

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Jeri Martinus, SE
2	Sekretaris Desa	Iwan Kurnia Chandra, S.Ip
3	Kaur Keuangan	Toriana Rahayu
4	Kaur Tata Usaha & Umum	Maryam Kirung
5	Kaur Perencanaan	Agusten, S.Pd.K
6	Kasi Pelayanan	Fredy Philipus
7	Kasi Pemerintahan	Ping, S.Th.

8	Kasi Kesejahteraan	Noni, S.Pd.K
---	--------------------	--------------

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tanjung Keranjang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, dan Kepala Seksi Pemerintahan. Berikut adalah tugas dan fungsi Pemerintah Desa Tanjung Keranjang.

a. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Saat ini, Kepala Desa Tanjung Keranjang dijabat oleh Bapak Jeri Martinus, SE. Sebagai Kepala Desa, Bapak Jeri Martinus bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,

administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah;

- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna; dan
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Saat ini, sekretaris Desa Tanjung Keranjang dijabat oleh Bapak Iwan Kurnia Chandra, S.IP. Sebagai Sekretaris desa, Bapak Iwan Kurnia Chandra bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan perangkat desa, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan penegeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, Kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melakukan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Keranjang

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan struktur Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Keranjang.

**Tabel 2.9 Struktur Badan Permusyawaratan Desa
Tanjung Keranjang**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Jhonidy Awe
2	Wakil Ketua	Marsudi
3	Sekretaris	Faron
4	Anggota	Jhony Usat
5	Anggota	Lia Margarita

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021

Dalam menjalankan tugas, Kepala Desa bersama Perangkat Desa akan selalu berdinamika dan “berhadapan” dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan akuntabilitas horizontal. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa

merupakan institusi demokrasi perwakilan kalurahan. Tetapi, ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR.

Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan bersama pemerintah kalurahan. Itu berarti bahwa BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan kalurahan. Itu juga berarti bahwa fungsi hukum (legislasi) BPD relatif kuat.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai lembaga kalurahan yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh mengatur dan mengurus kalurahan. BPD juga menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat kalurahan; melakukan pengawasan kinerja Lurah serta menyelenggarakan musyawarah kalurahan. Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol, dan deliberasi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan fungsi politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Sedangkan fungsi

politik BPD terdiri dari: *Pertama*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. *Ketiga*, menyelenggarakan musyawarah desa.

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanjung Keranjang

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan macam-macam Lembaga Kemasyarakatan di Desa Tanjung Keranjang.

Tabel 2.10 Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanjung Keranjang

No	Nama Lembaga
1	Rukun Tetangga (RT)
2	Rukun Warga (RW)
3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4	Karang Taruna
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
6	Lembaga Adat Kenyah Umalasan
7	Pos Layanan Terpadu (Posyandu)
8	Kerukunan/Paguyuban Keluarga Besar Bangen Tawai (KKBBT)
9	Sanggar Tari Bangen Tawai

Sumber: Profil Desa Tanjung Keranjang Tahun 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Desa Tanjung Keranjang mempunyai tiga jenis institusi atau lembaga kemasyarakatan yaitu institusi parokhial, institusi asli, dan institusi korporatis.

Pertama, institusi parokhial. Institusi parokhial adalah sebuah institusi asli di ranah desa yang terbentuk dan memiliki ikatan sosial (*social*

bonding) berdasar kesamaan suku, agama, aliran, kerabat, dan unsur-unsur bawaan lain. Paguyuban Keluarga Besar Bangen Tawai dan Sanggar Tari Bangen Tawai merupakan bagian dari institusi parokhial ini. Organisasi semacam ini tidak bisa dikategorikan sebagai organisasi masyarakat sipil karena tidak berorientasi pada kepentingan public, melainkan berorientasi ke dalam (*inward looking*) yang mendefenisikan secara jelas siapa anggota dan bukan anggota. Mereka berupaya membangun solidaritas internal atau tolong-menolong diri mereka sendiri (*self help*) dengan mengutamakan nilai-nilai kerukunan, persabatan, persaudaraan, dan kebersamaan di antara mereka sendiri.

Kedua, institusi asli. Institusi asli (*indigenous institution*) merupakan institusi yang berbasis pada adat. Pengaruh adat jauh lebih kuat dari pada pengaruh pemerintah dan agama. Lembaga Adat Kenyah Umalasan termasuk dalam institusi asli ini. Mereka memiliki *self-governing community* yang memiliki pranata dan kearifan lokal, yang mengutamakan keteraturan dan keseimbangan: *social order*, *ecological order*, dan *spiritual order*. Mereka juga memiliki tradisi demokrasi komunitarian, yang mengutamakan kebaikan bersama dengan model pengambilan keputusan secara deliberatif melalui institusi asli. Institusi asli mengedepankan emansipasi dalam merawat harmoni sosial dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan tetapi tidak terhadap isu-isu publik kekinian. Mereka juga melakukan eksklusi terhadap kaum

perempuan dan rakyat kecil yang tidak punya “tanah” dan “darah”, sekaligus eksklusif terhadap orang lain yang berbeda.

Ketiga, institusi korporatis. Institusi korporatis adalah institusi yang dibentuk oleh negara di ranah desa. Institusi seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, LPMD, dan Posyandu termasuk dalam institusi korporatis ini. Institusi-institusi ini merupakan penerima manfaat dari program pemerintah. Institusi-institusi ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah/negara dalam menjalankan tugas-tugas administratif untuk mengontrol penduduk dan tanah. Berbeda dengan institusi asli dan parokhial yang kaya dengan *social bonding* yang eksklusif, institusi korporatis memiliki *social bridging* inklusif yang melampaui batas-batas agama, suku, dan kerabat. Namun, ketiga institusi ini tetap eksklusif secara vertikal, yakni melakukan terhadap kaum perempuan, miskin, dan kaum marginal lainnya. Ketiganya juga miskin jaringan sosial yang berorientasi keluar (*outward looking*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almond, Gabriel A. (eds. Kedua). 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik Dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Askara
- Bungin, Burhan. (eds. Kedua). 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama
- Denzim, Norman K Dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research. Terj. Dariyanto dkk*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Eko, Sutoro. Dkk. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPM "APMD".
- Fukuyama, 1995. *Trust Kebijakan Sosial Dan Penciptaan Kemakmuran*, Yogyakarta: Qalam.
- Hayden, Goran. 1992. *Governance and The Study of Politics*, dalam Goran Hayden (Eds), *Governance and Politics, In Africa*, Lynne Rienner, Colorado.
- Huttington, S.P dan Nelson, J.M. 1977. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Mas' oed Mochtar dan Colin MacAndrew. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Maukidiah, Sri. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Zanafa Publishing.
- Plano, Jack. Dkk. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saparin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV Bandung: Alfabetha.

Jurnal

- Ahmad Mustanir dan Irfan Jaya. *Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Politik Profetik. Volume 04, Nomor 1 Tahun 2016.
- Ahmad Rijali. *Analisis Data Kualitatif*. Volume. 17 Nomor 33 Januari – Juni 2018.
- Arga Sevtyan V, Wawan Sobari dan Hilmy Mochtar. *Perilaku Gumunan: Rasionalitas Semu Pemilih Jawa (Temuan Awal)*. Volume 4, Nomor 1, April 2018.
- Dessi Permatasari dan Cahyo Seftyono. *Musyawahar Mufakat Atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia*. Vol 13 No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi: Volume 13, Nomor 2 April 2014.
- Erna Febriani. *Analisis Perilaku Memilih (Voting Behavior) Pemilih Pemula Wilayah Jakarta Barat Menjelang Pemilihan Umum 2019*. Volume 4, Nomor 1 (Maret-Agustus 2018).
- Haryanto. *Kebangkitan Party Id: Analisis Perilaku Memilih Dalam Politik Lokal di Indonesia*. Sosial dan Ilmu Politik. Volume 17, Nomor 3, Maret 2014 (291-308) ISSN 1410-4946.
- Immanuel N. Tadanugi. *Budaya Politik Lokal Pada Pilkades Di Kecamatan Lage Kabupaten Poso Tahun 2010*. Jurnal Administratie Edisi 04 Maret 2015. Volume 1 (nomor tidak dicantumkan).
- Ira Indra Gerungan. *Perilaku Memilih Masyarakat Desa Touliang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015*. (tahun tidak dicantumkan).
- Khoirul Saleh dan Achmat Munif. *Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi*. ADDIN. Volume 9, Nomor 2, Agustus 2015.
- Rachmi Fatimah Nasution. *Perilaku Memilih Masyarakat Mandailing Natal Pada Pemilihan Kepala Desa*. e-ISSN: 2621-4105.
- RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin. *Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014*. (diterima: 27 Februari 2015; direvisi: 28 Mei 2015; disetujui: 25 Juni 2015).

Yana Suryana. *Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik*. Jurnal Penelitian Hukum. Volume 9, Nomor 1, Januari 2018.

Lain-Lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Ketua Rukun Tetangga Serentak.

<https://docplayer.info/48188685-Instrumen-wawancara-partisipasi-politik-mahasiswa-dalam-pilkada-kabupaten-ponorogo-tahun-2015.html> (diakses pada tanggal 27 mei 2021, pukul 20:00)

https://www.wikiwand.com/id/Tanjung_Keranjang,_Malinau_Kota,_Malinau (diakses pada tanggal 29 mei 2021, pukul 16:00).